

Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Pengendalian Interen Akuntansi Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kotamadya di Provinsi Sumatera Barat)

Riza Agustia Sari

(Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: rizaagustiasari18@gmail.com)

Fefri Indra Arza

(Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: vindra_msi@yahoo.co.id)

Abstract

This study examines the effect of human resources quality, usefulness of local financial information system, and of accounting internal control on timeliness of local government financial reporting. Population of this research was accounting or financial staff on DPPKAD in West Sumatera province. The method of collecting the data was using questioner and analyzed with multiple regression.. The results showed that human resources quality, and accounting internal control have significant positive effect on timeliness of financial reporting, but usefulness of local financial information system does not affect on timeliness of financial reporting. This study suggested that local government should increase the human resources quality and also optimized usefulness of local financial information system.

Keywords: *Human resources quality, timeliness of financial reporting, usefulness of local financial information system and of Accountancy intern controlling.*

1. Pendahuluan

Dewasa ini perkembangan sektor publik di Indonesia ditandai dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas terhadap lembaga-lembaga publik baik di tingkat pusat maupun daerah. Tuntutan akuntabilitas tersebut terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009).

Laporan keuangan pemerintah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara menyatakan tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Selain itu, keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah merupakan upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip tepat waktu dan

disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Menurut PP 71 Tahun 2010 ketepatan waktu adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Ketepatan waktu menunjukkan bahwa laporan keuangan harus disajikan pada kurun waktu yang teratur untuk memperlihatkan perubahan keadaan perusahaan yang pada gilirannya mungkin akan mempengaruhi prediksi dan keputusan pemakai.

Ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan salah satu faktor penting dalam penyajian suatu informasi yang relevan. Laporan keuangan sebagai sebuah informasi yang dikandung disediakan tepat waktu bagi para pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan (Mamduh M.H, 2007). Ketepatan waktu berarti bahwa informasi harus segera tersedia bagi para pemakai untuk membantunya mengambil keputusan, sehingga membuat informasi itu menjadi lebih relevan terhadap kebutuhan mereka (Harrison Jr, 2012). Ketepatan waktu tidak menjamin relevansi, tetapi relevansi tidaklah mungkin tercapai tanpa ketepatan waktu. Oleh karena itu, ketepatan waktu adalah penting pada publikasi laporan keuangan.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan kegiatan atau aktivitas suatu entitas. Laporan keuangan yang baik

tidak dapat dipisahkan dari faktor sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, karena pegawai/aparatur tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga laporan keuangan bisa disajikan tepat waktu.

Berbagai penelitian telah menguji hubungan sumber daya manusia dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian Wiwik (2010) dan Celviana (2010) menemukan sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan penelitian Fadila (2013) dan Desmiyawati (2014) menemukan kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sumber daya manusia akan sangat membantu mempercepat penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut menjadi tepat waktu.

Sistem informasi keuangan daerah (SIKD) sesuai dengan peraturan pemerintah No 56 Tahun 2006 didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Penggunaan teknologi informasi dalam berbagai aspek kegiatan bisnis dapat dipahami karena keberadaan teknologi informasi dapat menyediakan kebutuhan informasi dunia bisnis dengan cepat, tepat waktu, relevan, dan akurat (Wilkinson dan Cerullo, 1997 dalam Dedi, 2007).

Sejumlah penelitian telah menguji hubungan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Diantaranya penelitian Nana (2013) serta Desmiyawati (2014) menemukan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan semakin baik pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah akan meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, sistem pengendalian intern didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian intern akuntansi mempunyai tujuan utama untuk mengamankan aset (harta kekayaan) dan menjamin kebenaran serta ketepatan dari data

akuntansi. Kurangnya pengendalian intern akuntansi pada pengelolaan keuangan daerah menyebabkan keterlambatan dalam pembuatan pelaporan keuangan daerah, ketidaktertiban penyusunan dan penerapan kebijakan, kurangnya komitmen terhadap kompetensi, tidak optimalnya kegiatan identifikasi risiko dan analisis risiko, lemahnya pengendalian fisik atas aset, serta pencatatan transaksi yang kurang akurat. Dengan demikian, semakin tinggi pengendalian intern akuntansi dalam instansi pemerintah diharapkan makin meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan sesuai dengan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Fenomena yang terjadi saat ini berkenaan dengan pelaporan keuangan berdasarkan Laporan BPK RI yang dikutip dari berita online nasional (Pikiran Rakyat, 9/04/2015), diperoleh fakta bahwa masih sedikit pemerintah daerah yang tepat waktu melaporkan laporan keuangan ke BPK. Dari 542 pemerintah daerah (Pemda), baru 68 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diterima laporan pada semester II 2014. Padahal berdasarkan pasal 297 ayat 1 Permendagri No 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa laporan keuangan harus disampaikan oleh kepala daerah kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, atau paling lambat pada akhir Maret.

Dalam penyajian laporan keuangan, harus disadari bahwa banyak pihak yang akan mengandalkan ketepatan waktu dalam laporan keuangan tersebut. Salah satu tujuannya adalah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang tersaji dalam laporan keuangan tersebut harus tepat waktu sehingga bermanfaat bagi para pemakai.

2. Telaah Literatur Dan Perumusan Hipotesis

2.1 Teori Keagenan

Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik meliputi pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), serta pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal).

Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan *self interest*-nya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan, sampai dengan penyajian laporan keuangan yang sewajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah

baik, serta untuk mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat.

Teori keagenan juga menyatakan bahwa agen bersikap oportunitis dan cenderung tidak menyukai resiko. Tanggungjawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan. Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari resiko berupa ketidakpercayaan *stakeholders* terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah (Safitri, 2009 dalam Desmiyawati, 2014).

2.2 Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan *output* akhir dari proses akuntansi yang dilaksanakan di tingkat SKPD dan PPKD. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (Nunuy, 2010).

Menurut Suwardjono (2005) pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomik dan sosial negara. Sedangkan menurut FASB dalam *Statement of Financial Accounting Concepts* mengartikan pelaporan keuangan sebagai sistem dan sarana penyampaian informasi tentang segala kondisi dan kinerja perusahaan, terutama dari segi keuangan.

2.3 Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan

Ketepatanwaktuan pelaporan keuangan sangat mempengaruhi ketersediaan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Ketepatanwaktuan pelaporan keuangan tidak hanya bermanfaat untuk organisasi sektor publik namun juga berdampak pada ketersediaan informasi di organisasi non sektor publik. Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 ketepatanwaktuan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan.

Menurut Mamduh (2007) ketepatanwaktuan pelaporan keuangan merupakan ketersediaan informasi ke pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Jika informasi tidak ada pada waktu dibutuhkan untuk membuat keputusan, maka informasi tersebut tidak lagi relevan dan tidak mempunyai manfaat untuk pengambilan keputusan. Untuk menentukan prestasi perusahaan lebih akurat, pembatas waktu diperlukan.

Sedangkan Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa laporan keuangan harus disajikan tepat

waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.

Kendala ketepatanwaktuan penyajian laporan terkait dengan lama waktu yang dibutuhkan oleh organisasi yang membutuhkan. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan, maka akan semakin baik untuk pengambilan keputusan. Ketepatanwaktuan berarti bahwa informasi harus segera tersedia bagi para pemakai untuk membantunya mengambil keputusan, sehingga membuat informasi itu menjadi lebih relevan terhadap kebutuhan mereka (Horrison Jr, 2012).

2.4 Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Edy (2009) sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya. Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Widodo, 2001 dalam Fadila, 2013).

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004), untuk menilai kinerja dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan suatu kegiatan atau tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, maka sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Menurut laporan akhir studi GTZ & USAID/CLEAN Urban (2001) dalam Fadila (2013) indikator-indikator yang terdapat pada kualitas sumber daya manusia adalah sebagai berikut; (a) sumber daya yang berkualitas; (b) latar belakang pendidikan; (c) uraian peran dan fungsi; (d) peran dan tanggungjawab; (e) fungsi akuntansi; (f) proses dan prosedur akuntansi; (g) proses akuntansi; (g) sumber daya pendukung operasional; (h) pelatihan keahlian dalam tugas; dan (i) anggaran dana.

2.5 Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Sistem informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan, bilamana dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam organisasi (Henry C.Lucas

dalam Jogiyanto, 2000). Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) didefinisikan sebagai suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah, yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah. Informasi keuangan daerah yang disampaikan oleh daerah kepada pemerintah mencakup:

- a) APBD dan realisasi APBD provinsi, kabupaten, dan kota termasuk perubahan APBD;
- b) Neraca daerah;
- c) Laporan arus kas;
- d) Catatan atas laporan keuangan daerah;
- e) Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan;
- f) Laporan keuangan perusahaan daerah; dan
- g) Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

Sistem informasi keuangan daerah secara nasional diselenggarakan oleh Menteri Keuangan RI dan memiliki fungsi:

- a) Penyusunan Standar Informasi Keuangan Daerah;
- b) Penyajian Informasi Keuangan Daerah kepada daerah;
- c) Penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian informasi;
- d) Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi pengembangan SIKD;
- e) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SIKD;
- f) Pembakuan SIKD yang meliputi prosedur, pengkodean, peralatan, aplikasi dan pertukaran informasi; dan
- g) Pengkoordinasian jaringan komunikasi data dan pertukaran informasi antar instansi pemerintah.

Penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah di masing-masing daerah mempunyai tujuan:

- a) Membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah;
- b) Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah;
- c) Membantu kepala daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah;
- d) Membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah;
- e) Menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat;

- f) Mendukung penyediaan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan dalam SIKD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, indikator-indikator yang terdapat pada pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) adalah sebagai berikut:

- a) Proses dokumentasi, administrasi, dan pengolahan data pengelolaan keuangan daerah menggunakan SIKD dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b) Penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c) Penyediaan informasi keuangan daerah dalam rangka mendukung SIKD.

2.6 Pengendalian Intern Akuntansi

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang mendefinisikan sistem pengendalian intern sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur pokok yang diciptakan dalam menciptakan pengendalian akuntansi yang efektif antara lain (a) adanya perlindungan fisik terhadap harta; (b) pemisahan fungsi organisasi yaitu pemisahan fungsi organisasi yang saling berkaitan; (c) adanya jejak audit yang baik; dan (d) sumber daya yang optimal (Wahana Komputer, 2003).

Menurut Mahmudi (2007) dalam Desmiyawati (2014), komponen penting dari pengendalian intern organisasi terkait dengan sistem akuntansi antara lain sebagai berikut:

- a) Sistem dan prosedur akuntansi

Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi (pasal 98 PP Nomor 58 Tahun 2005): (a) Sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas; (b) Sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas; (c) Sistem dan prosedur akuntansi aset; dan (d) Sistem dan prosedur akuntansi selain kas.

- b) Otorisasi

Otorisasi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah sangat penting, karena tanpa sistem otorisasi yang baik, maka keuangan daerah sangat berisiko untuk terjadi kebocoran. Otorisasi bisa dalam bentuk kewenangan dalam memberikan tanda tangan pada formulir dan dokumen tertentu. Tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang maka transaksi tidak dapat dilakukan, atau kalau ada transaksi

tanpa otorisasi maka transaksi tersebut dikategorikan tidak sah atau ilegal.

c) Formulir, dokumen, dan catatan

Setiap transaksi yang terjadi di pemerintah daerah harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Selain terdapat bukti yang valid dan sah, transaksi tersebut harus dicatat dalam buku catatan akuntansi. Kelengkapan formulir dan dokumen transaksi serta catatan akuntansi sangat penting dalam proses audit keuangan.

d) Pemisahan tugas

Fungsi-fungsi atau pihak yang terkait dalam suatu transaksi harus dipisahkan. Suatu transaksi dari awal hingga akhir tidak boleh ditangani oleh satu fungsi atau satu orang saja. Harus dipisahkan antara fungsi pencatatan uang serta pengotorisasi. Harus dilakukan pemisahan tugas secara tegas dengan deskripsi tugas pokok dan fungsi yang jelas dalam rangka menghindari terjadinya kolusi, kecurangan, dan korupsi.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian Wiwik Andriani (2010) di pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. menemukan bahwa kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh positif signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

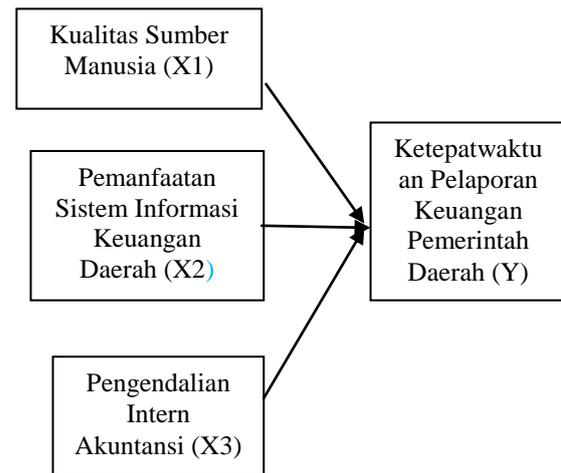
Penelitian Celviana dan Rahmawati (2010) di Pemda Subosukawonosraten menemukan bahwa sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Lismawati (2012) juga menemukan bukti empiris kemampuan sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Adapun penelitian Fadila Ariesta (2013) di kabupaten Pasaman Barat menemukan juga bahwa kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Disamping itu, kualitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Berikutnya riset Desmiyawati (2014) di pemerintah daerah Riau menemukan bahwa SDM, pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap keandalan, sedangkan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keandalan. Sumber daya manusia dan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2.8 Model dan Hipotesis Penelitian

Gambar 1 di bawah ini memperlihatkan model yang digunakan dalam penelitian ini :



Gambar 1. Model Penelitian

Berdasarkan model di atas maka hipotesis yang ingin dibuktikan dalam penelitian ini adalah:

- H₁:** Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan Pemerintah daerah.
- H₂:** Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan pemerintah keuangan daerah.
- H₃:** Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan pemerintah keuangan daerah.

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong penelitian kausatif, yakni berusaha menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang ada pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data dari <http://bkd.padang.go.id> diketahui DPPKAD pada Kabupaten dan Kota di propinsi Sumatera Barat berjumlah 19 DPPKAD.

Penelitian ini menggunakan metode total sampling dengan 190 subjek. Responden dalam penelitian ini adalah kepala dan staf sub bagian akuntansi/ penatausahaan keuangan pada DPPKAD.

3.3 Jenis & Teknik Analisis Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data subyek, sedangkan dilihat dari sumbernya maka data penelitian ini termasuk kategori data primer. Data penelitian tersebut diperoleh langsung dari instansi pemerintah daerah dengan menggunakan kuesioner. Selain itu, peneliti juga melakukan tanya jawab (wawancara) pada beberapa sampel penelitian yang bersedia untuk diwawancarai.

Proses penganalisisan data dimulai dengan melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu (uji Normalitas, uji Multikolinearitas dan uji Heteroskedastisitas), sebelum dilanjutkan dengan melakukan Uji F, Uji koefisien determinasi, regresi berganda dan Uji t.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Ketepatwaktuan pelaporan keuangan didefinisikan sebagai ketersediaan informasi ke pembuat keputusan. Kualitas sumber daya didefinisikan sebagai kemampuan baik dalam tingkatan individu, organisasi/kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Bagian dari pengendalian intern meliputi rencana organisasi, prosedur, dan catatan yang dirancang untuk menjaga keterandalan data akuntansi dan meningkatkan ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Sedangkan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah didefinisikan sebagai suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi.

4. Hasil Analisis Data Dan Pembahasan

4.1 Analisis Data Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Responden

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 19 Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Setiap populasi diwakili masing-masing 10 orang responden. Jumlah kuesioner yang telah disebar hanya 140 yang kembali. Dari 140 kuesioner yang balik tersebut hanya 119 kuesioner saja yang bisa diolah lebih lanjut.

4.1.2 Uji Validitas dan Realibilitas

Uji Validitas

Pengujian validitas menggunakan *Corrected Item-Total Colleration*. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data dikatakan valid, dimana r_{tabel} untuk

$N=119$, adalah 0.180. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan bahwa nilai *Corrected Item-Total Colleration* untuk masing-masing item variabel X_1 , X_2 , X_3 , dan Y semuanya di atas r_{tabel} . Dimana $r_{hitung} > r_{tabel}$ adalah r_{hitung} variabel Y sebesar 0,325, sedangkan variabel X_1 sebesar 0,399, variabel X_2 sebesar 0,396 dan variabel X_3 sebesar 0,540. Jadi dapat dikatakan bahwa seluruh item pernyataan variabel X_1 , X_2 , X_3 dan Y adalah valid. (Tabel 15).

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha*. Untuk uji reabilitas instrumen, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik. Secara umum keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,7 bisa diterima dan lebih dari 0,8 adalah baik.

Hasil pengolahan data penelitian memperlihatkan skor keandalan konsistensi antar item atau koefisien keandalan untuk ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah 0,642, untuk instrumen kualitas sumber daya manusia 0,854, untuk instrumen pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah 0,755, dan untuk instrumen pengendalian intern akuntansi 0,905. Dengan demikian dapat dikatakan semua instrumen penelitian telah reliabel.

4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai seluruh variabel dari *kolmogorov smirnov* $> 0,05$, yaitu 0,688. Berdasarkan hasil tersebut dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian dinyatakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Model regresi yang dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai $VIF < 10$ dan *Tolerance value* $> 0,10$. Berdasarkan pengolahan data, dapat dilihat hasil perhitungan nilai VIF dan *Tolerance*. Masing-masing variabel bebas tersebut memiliki nilai $VIF < 10$ dan *Tolerance* $> 0,10$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas digunakan uji *gleysier*. Pada uji ini apabila hasilnya $sig > 0,05$ maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat dilihat tingkat signifikansi $> \alpha 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas

4.2 Hasil Pengujian Hipotesis

Uji F (F-Test)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas dalam model berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Nilai F_{tabel} pada α 0,05 adalah 2,68. Nilai F_{hitung} adalah 26,805 sedangkan nilai sig adalah 0,000. Dengan demikian $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai sig $< \alpha$ 0,05 yaitu $26,805 > 2,68$ dan sig $0,000 < \alpha$ 0,05.

Data di atas menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Ini berarti model penelitian telah *fix* digunakan untuk uji t statistik yang menguji variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Koefisien Determinasi (Nilai *Adjusted R Square*)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu.

Berdasarkan hasil *output* diperoleh angka *Adjusted R Square* sebesar 0,396 atau 39,6%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi seluruh variabel bebas (kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan pengendalian intern akuntansi) mampu menjelaskan 39,6% variasi variabel terikat (ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah). Sedangkan sisanya sebesar 60,4% dipengaruhi oleh variabel lain.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dan nilai sig dengan α yang diajukan yaitu 95% atau $\alpha = 0,05$. Dari pengelolaan data statistik diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 5,843 + 0,139(X_1) + 0,060(X_2) + 0,107(X_3) + e$$

Angka yang dihasilkan dari pengujian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kontanta (α)
Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 5,843 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu kualitas SDM, pemanfaatan SIKD dan pengendalian intern akuntansi adalah nol maka nilai ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah 5,843 satuan.
- b. Koefisien Regresi (β) X_1
Nilai koefisien kualitas SDM sebesar 0,139, hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan kualitas SDM, maka ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,139 satuan.

- c. Koefisien Regresi (β) X_2
Nilai koefisien pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah sebesar 0,060. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, maka ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,060 satuan.
- d. Koefisien Regresi (β) X_3
Nilai koefisien pengendalian intern akuntansi sebesar 0,107 hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pengendalian intern akuntansi, maka ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,107 satuan.

Uji Hipotesis (t-Test)

Uji t dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam persamaan regresi secara parsial dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Hipotesis diterima bila tingkat signifikansi ($\alpha \leq 0,05$) dan koefisien regresi (β) positif. Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Nilai t_{tabel} dengan $\alpha = 0,05$ dan derajat bebas (db) = $n - k - 1$, maka db = $119 - 3 - 1 = 115$ adalah 1,98081.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada tingkat α 0,05 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis pertama (H1)

Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig $< \alpha$ (0,05). Nilai t_{tabel} pada α (0,05) adalah 1,98081. Pada tabel dapat dilihat bahwa variabel kualitas sumber daya manusia memiliki nilai signifikansi 0,000 (sig $< 0,05$) nilai t_{hitung} (positif) 3,927 $> 1,98081$. Nilai koefisien β dari variabel kualitas sumber daya manusia bernilai positif sebesar 0,139.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian **H₁ diterima**.

2. Pengujian Hipotesis kedua (H2)

Pengujian hipotesis kedua dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig $< \alpha$ (0,05). Nilai t_{tabel} pada α (0,05) adalah 1,98081. Pada tabel dapat dilihat bahwa variabel pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah memiliki nilai signifikan 0,134 (sig $> 0,05$) nilai t_{hitung} (positif) 1,507 $< 1,98081$ dan nilai koefisien β dari variabel sistem pengendalian internal pemerintah bernilai positif sebesar 0,060. D

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan positif

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian **H₂ ditolak**.

3. Pengujian Hipotesis ketiga (H₃)

Pengujian hipotesis ketiga dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha$ (0,05). Nilai t_{tabel} pada α (0,05) adalah 1,98081. Pada tabel dapat dilihat bahwa variabel pengendalian intern akuntansi memiliki nilai signifikan 0,004 ($sig < 0,05$) nilai t_{hitung} 2,913 $>$ 1,98081 dan nilai koefisien β dari variabel pengendalian intern akuntansi bernilai positif sebesar 0,107.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern akuntansi (X₃) berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian **H₃ diterima**.

4.3 Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil pembahasan lebih lanjut akan diuraikan dalam poin-poin berikut ini :

4.3.1 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penelitian ini menemukan bukti empiris hipotesis pertama yaitu kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Temuan penelitian ini konsisten dengan temuan riset Fadila (2013) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dalam hal ini sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena pegawai tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu.

Secara teoritis dapat dijelaskan menurut Werter dan Davis (1996) dalam Edy (2009), bahwa sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Widodo, 2001 dalam Fadila, 2013).

Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia dapat meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah, karena dengan kemampuan, bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup, maka pegawai dan

pihak-pihak pemegang amanah (*agent*) akan mampu mencapai tujuan-tujuan organisasi, yaitu untuk menyajikan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang tepat waktu.

Selain itu sumber daya manusia yang berkualitas akan tepat waktu untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban yaitu kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal) dan kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal).

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan pada beberapa sampel penelitian dan pengamatan terhadap isian kuesioner, terlihat bahwa kualitas sumber daya manusia di DPPKAD pada kabupaten dan kotamadya di Provinsi Sumatera Barat sudah cukup ini. Hal ini terlihat dari pemahaman mereka terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Walaupun ada pada beberapa DPPKAD yang mempunyai pegawai tidak berlatar belakang pendidikan di bidang akuntansi dan masih ada yang berlatar belakang pendidikan SMA, namun dengan banyaknya pelatihan-pelatihan yang diperoleh seperti pelatihan dari pemerintah pusat yaitu dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Inilah yang menyebabkan meningkatnya kualitas sumber daya manusia di DPPKAD tersebut.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin baik kualitas sumber daya manusia dalam suatu organisasi sektor publik (SKPD) akan meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah menjadi baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

4.3.2 Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penelitian ini menemukan bukti empiris hipotesis kedua yaitu pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah, namun berhasil membuktikan adanya pengaruh positif antara pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Temuan penelitian ini bertolak belakang dengan temuan penelitian sebelumnya oleh Putu (2014), yang justru menemukan bahwa sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Temuan penelitian ini

justro menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Secara teoritis, Ahmad (2009) menyatakan bahwa untuk terselenggaranya proses penyampaian informasi yang cepat dan akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (PP No.56 th 2005 tentang SIKD).

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan pada beberapa sampel penelitian dan pengamatan terhadap isian kuesioner terlihat bahwa DPPKAD telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), dan masih ada yang menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan telah menggunakan sistem komputerisasi. Dalam menyampaikan informasi keuangan daerah kepada masyarakat dari beberapa sampel penelitian terlihat ada yang tidak menyampaikan informasi keuangan daerah kepada masyarakat.

Teori keagenan juga menyatakan bahwa agen bersikap oportunitis dan cenderung tidak menyukai resiko. Tanggungjawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan yaitu kepada masyarakat luas.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah hanya berfokus untuk mencapai tujuan pemerintah dalam memberikan informasi keuangan sebagai bagian dari sistem informasi manajemen, dan teknologi yang digunakan hanya sebatas penggunaan komputer untuk menginput data transaksi. Hal ini mungkin tidak banyak membantu dalam meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah terutama pada DPPKAD kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat.

4.3.3 Pengaruh Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penelitian ini menemukan bukti empiris hipotesis ketiga yaitu pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap

ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Temuan penelitian ini konsisten dengan temuan penelitian Putu (2014) yang menemukan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Secara teoritis dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, disebutkan bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kurangnya pengendalian intern akuntansi pada pengelolaan keuangan daerah akan menyebabkan keterlambatan dalam pembuatan laporan keuangan daerah, sehingga kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan, kurangnya komitmen terhadap kompetensi, belum optimalnya kegiatan identifikasi risiko, dan analisis risiko, lemahnya pengendalian fisik atas aset serta pencatatan transaksi yang kurang akurat, dan tidak tepat waktu.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan pada beberapa sampel penelitian dan pengamatan terhadap isian kuesioner, terlihat bahwa pengendalian intern akuntansi pada DPPKAD kabupaten maupun kotamadya di Provinsi Sumatera Barat sudah dijalankan sesuai sistem dan prosedur akuntansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun di beberapa DPPKAD masih ada yang belum menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti laporan keuangan tidak direview dan disetujui terlebih dahulu oleh kepala sub bagian keuangan dan masih belum ada pemisahan tugas dalam rangka pelaksanaan APBD. Penulis melihat besarnya keinginan dan harapan para pegawai keuangan pada DPPKAD Kab dan Kota di Provinsi Sumatera Barat untuk mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berkaca pada teori agensi, dengan menjalankan sistem dan prosedur akuntansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka akan terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang transparan dan memberikan informasi yang berkualitas kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Sehingga tercapainya tuntutan akuntabilitas publik sebagai bentuk kewajiban pihak pemegang *amanah* (*agent*)

untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin baik pengendalian intern akuntansi dalam suatu organisasi sektor publik (SKPD) akan meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah menjadi baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

5. Kesimpulan, Keterbatasan, Dan Saran

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- b. Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- c. Pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain:

- a. Keseluruhan variabel independen yang diteliti hanya dapat menjelaskan sebesar 39,6% perubahan pada variabel dependen, sedangkan sisanya 60,4% ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.
- b. Pemilihan penelitian ini dilakukan pada DPPKAD Kab dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Dikarenakan hanya dilakukan pada satu SKPD saja dan satu provinsi, maka akan berakibat pada lemahnya validitas eksternal atau kurangnya kemampuan generalisasi dari hasil penelitian ini.
- c. Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner dan dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Namun wawancara yang dilakukan hanya pada beberapa sampel yaitu empat Kab/ Kota yang WDP dan WTP.

5.3 Saran

Berdasarkan uraian pada simpulan serta keterbatasan penelitian di atas, maka saran-saran yang bisa diajukan antara lain

- a. Bagi instansi pemerintahan, diharapkan untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki serta didukung dengan

pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah seoptimal mungkin dan adanya rancangan pengendalian intern akuntansi yang memadai agar menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang bernilai yaitu ketepatan waktu.

- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan pengendalian intern akuntansi untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perluasan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat dengan penyerapan anggaran seperti pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, dan faktor lainnya.
- c. Penelitian selanjutnya, jumlah SKPD yang dijadikan sampel penelitian sebaiknya diperbanyak sehingga kesimpulan yang dibuat dimungkinkan untuk dapat digeneralisasi, dan untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti wawancara langsung, metode survei lapangan

Daftar Pustaka

- Alimbudiono, Ria Sandra & Fidelis Arastyo Andono. 2004. Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah "XYZ" dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, Vol. 05 No. 02. Hal. 18-30.
- Ahmad, Yani. 2009. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Celviana, Winidyaningrum & Rahmawati. 2010. "Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi: Studi Empiris Di Pemda Subosukawonosraten". *Simposium Nasional Akuntansi XIII*. Porwokerto.
- Dedi, Rianto R. 2007. *Peranan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Pelayanan Di Sektor Publik*. Seminar Nasional Teknologi: Yogyakarta.
- Desmiyawati. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan: Study

- Empiris Pada SKPD Pemda Riau". *Jurnal Akuntansi*, Vol. 2, No. 2. Hal 163-178.
- Edy, Sutrisno. 2009. *Manajemen SDM*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Fadila, Ariesta. 2013. *Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi Program S1, Universitas Negeri Padang.
- Harrison Jr, Walter T, dkk. 2012. *Akuntansi Keuangan International Financial Reporting Standard-IFRS*. Edisi Kedelapan Jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Imam, Ghozali. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- <http://www.pikiran-rakyat.com> (diakses pada tanggal 3 Maret 2016)
- Jabal, Firadaus A & Suryo, Pratolo. 2012. Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kepuasan Aparatur Pemerintah Daerah menggunakan Model Dclone dan McLEAN. *Jurnal Akuntansi & Investasi*, Vol. 13No.1, halaman 28-34.
- Jogiyanto, HM. 2000. *Sistem Informasi Berbasis Komputer: Konsep Dasar dan Komponen*. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE.
- Lismawati. 2012. Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Volume: 04, No. 04, Juli-Desember 2012 ISSN: 1979-7338.
- Mamduh M Hanafi & Abdul Halim. 2007. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nana, Septry. 2013. *Pengaruh Peran Manajer dalam Penganggaran dan Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kinerja SKPD* (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang). Skripsi, Universitas Negeri Padang.
- Nunuy, Nur Afiah. 2010. *Akuntansi Pemerintah: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana
- Pemerintah Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Putu, Upabayu R M dan Wawan, Putra. 2014. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 8.2 (2014): 230-244. ISSN: 2302-8556.
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta. BPFE
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Wahana Komputer. 2003. *Panduan Aplikasi Sistem Akuntansi Online Berbasis Komputer*. Yogyakarta: Penerbit Andy.
- Wirawan. 2009. *Evaluasi Kinerja SDM*, Teori, Aplikasi, dan Penelitian. Jakarta: Salemba Empat.
- Wiwik, Andriani. 2010. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol 5 No.1 Juni 2014 ISSN hal 69-80

LAMPIRAN

A. Uji Validitas dan Realibilitas

1. Uji Validitas

Tabel 1
Nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil

Instrumen Variabel	Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> Terkecil
Ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y)	0,325
Kualitas sumber daya manusia (X1)	0,399
Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah (X2)	0,396
Pengendalian intern akuntansi (X3)	0,540

2. Uji Realibilitas

Tabel 2
Nilai *Cronbach's Alpha*

Instrumen Variabel	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>
Ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y)	0,642
Kualitas sumber daya manusia (X1)	0,854
Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah (X2)	0,755
Pengendalian intern akuntansi (X3)	0,905

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 3
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	119
Normal Parameters ^a Mean	.0000000
Std. Deviation	1.30046247
Most Extreme Absolute Differences	.065
Positive	.039
Negative	-.065
Kolmogorov-Smirnov Z	.714
Asymp. Sig. (2-tailed)	.688
a. Test distribution is Normal.	

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 4
Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5.843	1.360		4.296	.000		
kualitas sdm	.139	.035	.364	3.927	.000	.595	1.680
pemanfaatan sikd	.060	.040	.127	1.507	.134	.716	1.397
pengendalian intern akuntansi	.107	.037	.267	2.913	.004	.609	1.641

a. Dependent Variable: ketepatan waktu pelaporan keuangan

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5
Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.997	.779		3.848	.000
kualitas sdm	-.011	.020	-.065	-.550	.584
pemanfaatan sikd	-.004	.023	-.016	-.153	.879
pengendalian intern akuntansi	-.034	.021	-.187	1.609	.110

a. Dependent Variable: abresid

C. Hasil Penelitian

1. Uji F (*F-Test*)

Tabel 6
Hasil Uji F Statistik
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	139.547	3	46.516	26.805	.000 ^a
Residual	199.562	115	1.735		
Total	339.109	118			

a. Predictors: (Constant), pengendalian interan akuntansi, pemanfaatan sikd, kualitas sdm

b. Dependent Variable: ketepatanwaktuan pelaporan keuangan

2. Koefisien Determinasi (Nilai *Adjusted R Square*)

Tabel 7
Adj R Square Statistik
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.641 ^a	.412	.396	1.317

a. Predictors: (Constant), pengendalian intern akuntansi, pemanfaatan sikd, kualitas sdm

3. Analisis Regresi Berganda

Tabel 8
Uji T Statistik
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.843	1.360		4.296	.000
kualitas sdm	.139	.035	.364	3.927	.000
pemanfaatan sikd	.060	.040	.127	1.507	.134
pengendalian interan akuntansi	.107	.037	.267	2.913	.004

a. Dependent Variable: ketepatanwaktuan pelaporan keuangan